

## **BAB IV**

### **FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA MENOLAK BERGABUNG DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP**

#### **A. Kehati-hatian Indonesia bergabung dalam kerjasama Perjanjian Perdagangan**

Setiap Negara ketika akan melakukan sebuah hubungan perdagangan Internasional, maka Negara tersebut haruslah memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan perdagangan tersebut secara detail tentang aturan-aturan apa saja akan dilaksanakan, agar nantinya kerjasama perdagangan internasional tersebut dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi Negara yang mengikuti, serta tidak merasa bahwa Negara tersebut masuk dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional yang sia-sia.

Ketika ada tawaran yang datang ke Indonesia sebagai ajakan untuk bergabung dalam TPP namun Indonesia menolaknya, Meski empat negara ASEAN masuk dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP), untuk sementara ini Indonesia masih menolak untuk bergabung. Seperti yang diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memastikan bahwa Indonesia belum ikut bergabung dalam kerja sama perdagangan bebas TPP dan apa pun yang pemerintah lakukan berkaitan dengan kerja sama itu pemerintah akan mempelajari. Tentunya masih banyak negara-negara

anggota APEC lain yang masih akan mempelajari plus dan minusnya. Indonesia tentu memilih tidak perlu tergesa-gesa untuk masuk TPP. "ASEAN pun sebagai suatu entitas boleh bekerja sama dengan negara non-ASEAN dalam lintas Pasifik. Namun Indonesia perlu terus mengkaji dan memperhitungkan apakah dengan bergabung dengan TPP dapat membawa manfaat riil bagi ekonomi kita," tegasnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Indonesia mempercayai mekanisme perdagangan bebas selama terdapat unsur keadilan dan keseimbangan<sup>2</sup>, Kalau tidak ada dan ini tidak membuahkan keuntungan bagi Indonesia, misalnya menguntungkan secara perdagangan, investasi, penyerapan tenaga kerja atau tidak. maka pemerintah akan mengambil sikap yang sesuai, sehingga selagi mekanisme yang terbentuk memberikan keadilan dan keseimbangan Indonesia pasti akan mempertimbangkan ajakan tersebut. sebenarnya konsep Kemitraan Trans-Pasifik belum jelas. Apakah hanya akan memperkuat kerja sama kawasan atau memang benar mau perdagangan bebas. Selain itu, ekonomi Indonesia sebenarnya sudah terlampau bebas sejak meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1994. "Setelah WTO, ada

---

<sup>1</sup>Indonesia Menolak Masuk Trans Pacific Partnership (TPP), dalam [http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=677:indonesia-menolak-masuk-trans-pacific-partnership-tpp&catid=42:internasional&Itemid=62](http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=677:indonesia-menolak-masuk-trans-pacific-partnership-tpp&catid=42:internasional&Itemid=62), diakses 9 agustus 2012

<sup>2</sup>Indonesia Tegas Menolak Kerjasama Trans Pasifik, dalam <http://kabarhengkulu.com/mancanegara/read/indonesia-tegas-menolak-kerjasama-trans-pasifik>

perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement, ASEAN Free Trade Agreement, dan lain-lain<sup>3</sup>

Akan tetapi saat ini menolak karena Indonesia belum siap, dan membutuhkan waktu untuk dapat bergabung dengan TPP. Menurut Menlu RI Gita Wirjawan, untuk mencapai suatu titik daya saing tertentu dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena Indonesia bukan seperti negara maju yang sudah memulai industri sejak 200 tahun sebelumnya. Karena harus didahului dengan membuat studi mendalam dan tentunya juga melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait.<sup>4</sup> Sehingga Indonesia meminta waktu untuk memperbaiki daya saing ekonominya sebelum pada akhirnya memutuskan bergabung.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan TPP. "Selesaikan dulu hambatan-hambatan ekonomi di dalam negeri masing-masing sebelum memutuskan membuka pasar bebas yang lebih luas," tegas Sofjan.<sup>5</sup>

Dalam target waktu pelaksanaan TPP ini disebutkan bahwa TPP ini diharapkan dapat segera dilaksanakan pada tahun 2012, disini terlihat bahwa waktu

---

<sup>3</sup>Soal Kemitraan Trans-Pasifik, Sikap RI Berubah, dalam [www.tempo.co/read/news/2011/11/20/090367474/Soal-Kemitraan-Trans-Pasifik--Sikap-RI-Berubah](http://www.tempo.co/read/news/2011/11/20/090367474/Soal-Kemitraan-Trans-Pasifik--Sikap-RI-Berubah), diakses 9 agustus 2012

<sup>4</sup>Jepang Ingin ASEAN Terintegrasi TPP, Indonesia Menolak, dalam [www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=28908](http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=28908), diakses 9 agustus 2012

<sup>5</sup>SPI Desak Pemerintah Tolak Trans-Pasifik, dalam [www.mediaindonesia.com/read/2011/11/19/277421/284/1/-SPI-Desak-Pemerintah-Tolak-Trans-Pasifik](http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/19/277421/284/1/-SPI-Desak-Pemerintah-Tolak-Trans-Pasifik), diakses 9 agustus 2012

bagi pemerintah untuk melakukan pengadaptasian kondisi yang ada dalam negeri Indonesia tidaklah panjang, apa bila kita bandingkan dengan ACFTA yang membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk pengimplementasian dari tahun 2005-2010 saja Indonesia masih mengalami defisit. Sangat Ditakutkan dengan waktu Implementasian yang sangat singkat ditakutkan hal tersebut juga yang terjadi jika Indonesia bergabung dalam TPP.

Dari sisi rancangan yang akan dibentuk dalam TPP, akan diberlakukan penurunan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan menjadi 0% untuk semua pos. hal ini akan sangat merugikan Indonesia karena jika diperhatikan sektor industry yang dimiliki Indonesia masih berkuat pada sektor konsumsi, sehingga dengan membuka pasar dengan sebebaskan tersebut maka sector-sector yang berada diluar konsumsi tidak akan ada saringan yang menghalangi barang-barang luar yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan membuka pasar yang luas bagi Negara luar tanpa pemerintah bisa memberikan persaingan untuk produk-produk tersebut.

Karena dengan barang yang masuk tanpa bea masuk sepeserpun atau 0% maka akan membuat barang dari luar negeri tersebut menjadi lebih murah dan akan lebih laku jika dibandingkan dengan produk dalam negeri. hal ini disebabkan oleh biaya produksi dalam negeri yang masih tinggi, dan tidak mungkin menurunkan harga barang, sehingga kemampuan untuk barang dalam negeri bersaing tidak akan kuat. Sehingga kemungkinan kekalahan produk dalam negeri akan terlibat

Hal ini terbukti terjadi pada dampak pelaksanaan ACFTA yang sudah berjalan lebih dari setahun ini sangat besar buat industri lokal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghitung, nilai impor produk industri Cina di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding 2009. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke Cina di 2010 hanya naik 34% dibanding 2009 yang hanya sebesar US\$ 15,69 miliar. Itu berarti, perdagangan Indonesia-Cina pada tahun lalu mengalami defisit hampir US\$ 5 miliar.<sup>6</sup>

Daya saing Indonesia belum setara karena masih banyak peraturan banyak yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, Untuk itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengaku sudah usul ke Presiden agar dalam 3-4 bulan ke depan dibuat disposisi dan rencana kerja yang jelas bagi para menteri terkait untuk menurunkan semua jenis tarif sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, jika daya saing sudah setara dengan negara Trans Pasifik lainnya, Indonesia tidak selalu menolak jika ditawarkan perdagangan bebas.

Tidak hanya aturan pajak, bunga kredit tinggi, dan masalah infrastruktur yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga biaya logistik. Untuk bisa bersaing, maka Indonesia harus menurunkan biaya logistik menjadi maksimal 10% dari biaya produksi, dari posisi saat ini yang sekitar 17%. Indonesia tidak bisa compete karena yang lainnya maksimal 10%. Karena bawa logistik naik kapal laut ke Papua harganya

---

<sup>6</sup> Rizki Caturini, Produk China menjadi raja, industry Lokal tak berdaya, dalam 2012 <http://linsus.kontan.co.id/2012/07/27/acfta/produk-china-menjadi-raja-industry-lokal-tak-berdaya>

dua kali lipat dibandingkan ke Shanghai. Karena pulangnya kosong, jadi kargonya kena dobel charge.<sup>7</sup>

Kalau seandainya Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan baik, itu bisa-bisa bukan perluasan pasar yang diperoleh, tapi mempersempit pasar di dalam negeri. Hal tersebut tidak Pemerintah sikapi dengan membuat hambatan tarif, tapi mempersiapkan kapasitas ekonomi supaya lebih siap berkompetisi di tingkat regional.

Disisi lain Indonesia menyadari bahwa pada saat ini Amerika lah yang sangat berniat terlaksananya TPP ini, Sulit dipungkiri bahwa sebetulnya TPP adalah skenario AS, meskipun inisiatif TPP tersebut bukan diawali oleh AS. Bisa ditebak dengan mudah bahwa TPP merupakan semacam counter action dari pengaruh berkembangnya perekonomian dan sekaligus militer Cina di kawasan ini. Nampaknya “Arab Spring” yang sukses dijalankan oleh AS/Eropa di Afrika Utara/Timur Tengah dalam rangka mencegah ekspansi ekonomi China di Afrika Utara/Timur Tengah, sekarang diimplementasikan oleh AS dan sekutu APEC-nya dalam bentuk “TPP” di kawasan ini, yang juga bertujuan mencegah Cina<sup>8</sup>.

Melalui kerangka kerjasama perdagangan bebas TPP, diharapkan meningkatkan ekspor produk AS dan pada gilirannya menggerakkan pasar domestiknya yang sedang lesu akibat krisis finansial. Amerika serikat ingin

---

<sup>7</sup>Dibujuk PM Australia, sikap RI melunak soal Trans Pacific Partnership, dalam [www.en.bisnis.com](http://www.en.bisnis.com), diakses 9 agustus 2012

<sup>8</sup>Wah, Yang Benar Nih Pak Boyo Berani Menentang Obama Melalui Penolakan TPP?, dalam

menciptakan lapangan kerja agar pengangguran di AS bisa memperoleh kembali sumber nafkah mereka."Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan perdagangan dan ekspor kita ke negara lain. Saya ingin orang-orang membeli barang yang tertera tiga kata, 'Made in America,' ujar Obama.<sup>9</sup>

Kawasan Asia Pasific, merupakan kawasan besar bagi pasar Amerika Serikat. Berdasarkan US Representative 2011, tercatat ekspor barang-barang AS ke kawasan ini mencapai total US\$775 miliar pada tahun 2010, atau 61% dari total ekspor AS ke seluruh dunia. Ekspor pertanian saja mencapai US\$83 miliar atau setara 72% total produk pertanian di tahun 2010<sup>10</sup> maka hal yang tidak diinginkan malah akan terjadi, misalnya Indonesia menjadi pasar bagi Amerika Serikat Untuk memperbaiki ekonomi Amerika Serikat.

Selain itu dari sisi keanggotaan dalam TPP, Tumpang tindih dengan Perdagangan Bebas yang telah ada menjadi salah satu alasan yang membuat pemerintah Indonesia menolak bergabung dalam TPP, hal ini disebabkan karena sebagian besar Negara-negara yang berada dalam TPP tersebut merupakan Negara-negara yang memiliki hubungan kerjasama perdagangan dengan Indonesia, sebut saja Australia, Indonesia yang tergabung dalam *Asean-Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZ-FTA), Jepang yang tergabung dalam *Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), ataupun dengan sesama Negara

<sup>9</sup>Tolak Obama Masuk 'TPP', RI Kembangkan Ekonomi Dalam Negeri, dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses 9 agustus 2012.

<sup>10</sup>SPI Desak Pemerintah Tolak Trans-Pasifik, dalam [www.m.jpnn.com](http://www.m.jpnn.com), diakses 9 agustus 2012.

ASEAN, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Maka pemerintah berpendapat dari pada akhirnya terganggunya fokus kerjasama, lebih baik Pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pada Perjanjian Perdagangan yang sudah terjalin sebelumnya, sehingga kemungkinan untuk memaksimalkan hasil dari kerjasama tersebut akan lebih terlihat.

Dengan demikian, Pemerintah menyadari bahwa Perdagangan bebas yang dilakukan bersama TPP saat ini memiliki banyak persiapan yang belum matang, apalagi dari segi waktu pengkondisian pelaksanaannya diharapkan mulai dari tahun 2012, akan tetapi Indonesia belum mampu bersaing dengan baik, bisa dikatakan Indonesia menghadapi TPP belum mempersiapkan apa-apa, pada akhirnya pemerintah menyadari banyaknya kekurangan persiapan tersebut kemungkinan besar dapat memberikan dampak kerugian besar yang akan dialami Indonesia, sehingga pemerintah perlu meneliti lebih jauh sebelum melakukan Kerjasama perdagangan TPP tersebut.

#### **A. Kurangnya Daya Saing Produk yang dihasilkan Indonesia**

Industri dalam negeri menjadi bagian yang harus pemerintah perhatikan, karena akan menjadi tolak ukur kekuatan Industri Indonesia kedepan, dalam hitungan pemerintah bahwa makin banyaknya masuk produk asing ke Indonesia, ini bisa mematikan Industri dalam negeri, hal ini disebabkan kurangnya daya saing produk yang dihasilkan pemerintah menyadari bahwa kurangnya daya saing produk dalam

negeri karena disebabkan factor pendukung dasar yang tidak memadai, seperti Infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, sehingga pemerintah lebih memilih opsi untuk melindungi industri dalam negeri semabari memperbaiki Infrastuktur penunjang. Apa lagi Pembangunan infrastruktur Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi infrastruktur di Indonesia bahkan terus tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Hal itu menunjukkan adanya kebijakan yang salah kaprah dari pemerintah dalam membangun infrastruktur selama ini.

Berdasarkan World Competitiveness Report, 2009 – 2010 daya saing infrastruktur Indonesia itu ada pada ranking 76 dan Malaysia 26. Kondisi itu memperlihatkan infrastruktur Indonesia tidak mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Padahal pada kenyataannya bahwa infrastruktur sangat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain kacau, infrastruktur Indonesia juga sangat tertinggal. Kondisi infrastruktur sebenarnya bisa mendukung proses ekspor impor dan mampu mendatangkan investasi. Namun, dua hal itu sulit diperoleh karena kondisi infrastruktur yang buruk. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan ekonomi secara umum. Jika akar masalahnya ada pada kebijakan fiskal dan ekonomi, penganggaran infrastruktur selama ini tidak berlangsung dengan baik sehingga eksekusi di lapangan terhambat.

Dampak akibat Buruknya infrastruktur Indonesia terlihat pada industry otomotif, Potensi pasar otomotif dalam negeri yang besar tidak cukup mendorong investor komponen menanamkan modalnya di Indonesia. Investor masih memilih Malaysia dan Thailand sebagai basis produksi karena menyediakan infrastruktur yang lebih baik. "Infrastruktur di dalam negeri masih lemah sehingga investasi di sektor komponen berjalan lambat dibandingkan dengan negara pesaing di ASEAN. Masalah pasokan listrik sering tidak stabil tetapi harga energi untuk industri terus meningkat setiap tahun serta jalan raya dan pelabuhan yang tidak memadai membuat investor baru sebatas mempertimbangkan Indonesia sebagai negara tujuan," kata Ketua Umum Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor Indonesia (GIAMM) Hadi Surjadipradja.<sup>11</sup>

Pada era motorisasi di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan membesarnya pangsa pasar mobil terhadap sepeda motor sudah berlangsung. Di tengah ancaman dampak krisis utang di Eropa dan pelemahan ekonomi Amerika Serikat, penjualan mobil pada 2012 bisa tumbuh 10% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 957.000 unit. Jika pasar mobil di dalam negeri terus membesar, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat struktur industri komponen dan meningkatkan investasinya. "Namun, momentum tadi dirusak oleh tidak adanya daya dukung investasi. Dalam posisi ini, industriawan menjadi serba salah,"

<sup>11</sup> <http://www.tribunnews.com/2012/01/04/Infrastruktur-Buruk-Membuat-Investor-Otomotif-Dalam-Negeri-Tidak-Cukup-Mendorong-Investor-Komponen>

ujarnya. Ia mengaku pesimistis Eropa akan melihat Indonesia sebagai basis produksi komponen mengingat tingginya biaya logistik dan kuatnya dominasi Jepang. Padahal, aliansi industri komponen Eropa yang tergabung dalam *International Automotive Components Group* (IAC) melihat Asean sebagai wilayah investasi yang paling potensial untuk memperluas pasar komponen Eropa pada 2012.<sup>12</sup>

Belum lagi peranan PII ( Penjamin Infrastruktur Indonesia ) belum memperlihatkan hasil kerja yang signifikan, Sejak berdiri pada akhir tahun 2009 sampai sekarang, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dianggap belum bekerja optimal. Peranan PII dalam pembangunan infrastruktur masih minim. Sampai saat ini, PII baru menjamin satu proyek, yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Tengah tahun lalu.<sup>13</sup>

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja industri dalam negeri. Di antaranya dengan melakukan restrukturisasi industri, seperti restrukturisasi industri tekstil, alas kaki, gula dan pupuk, pemenuhan kecukupan bahan baku, peningkatan SDM, perbaikan pelayanan publik serta melakukan pengamanan pasar melalui SNI wajib untuk produk tertentu, penerapan safeguard dan antidumping.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Indra BP, Infrastruktur Buruk Hambat Investasi Komponen Otomotif, dalam [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), diakses 24 mei 2012

<sup>13</sup>Peran Penjamin Infrastruktur Indonesia Masih "Loyo", dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 24 mei 2012

<sup>14</sup>Pemerintah Janji Fokus Benahi Sektor Industri, dalam [www.bappedajatimprov@go.id](mailto:bappedajatimprov@go.id), diakses 2 mei

Untuk itu pemerintah membentuk MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), MP3IE merupakan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan semua elemen pendukung ekonomi dan industri, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia tetapi dibarengi dengan perbaikan Infrastruktur yang ada, strategi Utama MP3EI adalah mengembangkan koridor ekonomi Indonesia, Memperkuat konektivitas nasional, serta Mempercepat kemampuan SDM dan Iptek Nasional<sup>15</sup>

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”, Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0–4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4–7,5 persen pada periode 2011–2014, dan sekitar 8,0–9,0 persen pada periode 2015–2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar

<sup>15</sup>MACTEORIAN Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025. Jurnal

6,5persen pada periode 2011–2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.<sup>16</sup>

Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi.

Masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;
- Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;
- Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;

<sup>16</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan P3EI Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan*

- Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”.
- Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”.
- Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Dalam melaksanakan proyek besar MP3EI ini, pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan Infrastruktur dan skema konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, yaitu :

*Pertama* “Konektivitas Intra – Koridor Ekonomi” Meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam koridor, Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana perkeretaapian penumpang dan barang, Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung (pelabuhan, energi) dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah non koridor ekonomi, Merevitalisasi angkutan penyeberangan, pelabuhan lokal serta optimalisasi pelayaran perintis dan mekanisme PSO, Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis, Pembangunan jaringan ekstension backbone hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama.

*kedua* "Konektivitas antar Koridor Ekonomi" Memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif antar-koridor ekonomi untuk daya saing regional dan global, Menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar koridor ekonomi, Penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan bandara utama sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi (*integrated logistic port management*), Pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan local dan pelabuhan 'hub' internasional, Pengintegrasian multi moda backbone (serat optik, satelit, microwave).

*ketiga* "konektivitas internasional"Menyiapkan dan menetapkan pelabuhan dan bandara sebagai 'hub' internasional di Kawasan Barat dan Timur Indonesia, Optimalisasi pengoperasian sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai 'hub' internasional melalui peningkatan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka penerapan *Customs Advance Trade System* (CATS) dan NSW serta terkoneksi sistem jaringan logistik nasional (*national supply chain*) dengan sistem jaringan logistik ASEAN (*ASEAN supply chain*) dan sistem jaringan logistik global (*global supply chain*) pada pelabuhan dan bandara internasional, Peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi (*integrated logistic port management system*), Membuka link/international gateway baru ke luar negeri sebagai alternatif link yang ada, Pembangunan *international exchange* di pusat-pusat pertumbuhan. Mempersiapkan

diri dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana konektivitas regional dan global untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada 2013, integrasi pasar ASEAN pada 2015, dan integrasi pasar global pada 2020.<sup>17</sup>

Pemerintah menyadari bahwa Infrastruktur merupakan salah satu penyebab buruknya kinerja industri dalam negeri, sehingga Pemerintah merasa perlu memperbaiki Infrastruktur, yang pada akhirnya juga akan berdampak baik pada hasil industri yang dihasilkan, dan sangat mungkin dengan Infrastruktur yang baik maka Produk industri Indonesia akan lebih mampu bersaing dengan Produk luar.

### **B. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk Memaksimalkan Pasar Domestik**

Kebijakan pemerintah menolak tawaran Presiden AS, Barack Obama dalam persekutuan perdagangan baru. karena pemerintah lagi memfokuskan perkembangan pasar dalam negeri. Karena itu pemerintah Indonesia tidak lagi fokus terhadap ekspor mengingat tingginya potensi permintaan dalam negeri maupun kawasan ASEAN. Pemerintah Tidak bisa orientasi ke ekspor terus. Perhatikan lebih banyak pasar dalam negeri yang memang relatif tidak seberat kondisi belahan bumi lain. Jadi lebih berarah pada pasar dalam negeri dan pasar kawasan<sup>18</sup>

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, karena Penguasaan pasar dalam negeri menjadi keniscayaan untuk mempertahankan kedaulatan pasar. Pasalnya

<sup>17</sup>MASTERPLAN Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, Jurnal. Menko Perekonomian RI

<sup>18</sup>Tolak Obama Masuk 'TPP'. RI Kembangkan Ekonomi Dalam Negeri, dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses 2

pasar Indonesia sangat terbuka dibanding negara lain. Akibatnya, banyak produk Indonesia yang terancam. Contoh kecil saja dapat terlihat dari banyaknya produk impor yang ada di Indonesia, misalnya saja sayur-mayur dan buah – buahan. Untuk itu, seharusnya pemerintah pusat bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap produk yang nyata-nyata mau dibunuh oleh produk luar seperti sayur-mayur dan buah-buahan ini.

Penduduk Indonesia yang besar memang menjadi incaran pasar negara-negara lain. Karena itu, mereka tertarik membuat perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Namun, Indonesia belum tentu siap memanfaatkan pasar bebas mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki penduduk Terbesar ke empat, dibawah Cina, India dan Amerika Serikat, selain itu juga pada tataran negara – Negara ASEAN hampir setengah dari populasi ASEAN berada di Indonesia, sehingga hal ini menjadi potensi pasar yang sangat besar, sehingga pemerintah perlu melakukan focus besar – besaran terhadap pasar domestik yang memiliki potensi yang besar ini.

Misalnya saja GAPMMI melaporkan, omzet produk makanan dan minuman dalam negeri sepanjang tahun 2011 mencapai sekitar Rp650 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp710 triliun tahun ini. Produk makanan dan minuman impor, hanya memberikan kontribusi sekitar 7% terhadap total nilai penjualan produk

makanan dan minuman nasional.<sup>19</sup> Hal tersebut menunjukkan betapa potesialnya pasar domestik, apa lagi sampai sekarang kebutuhannya besar dan cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Belum lagi dalam melakukan ekspor banyak hal yang perlu dipersiapkan, dan hal itu tidak mudah.

Seperti diketahui, Nielsen mencatat, konsumen Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam tingkat optimismenya, dengan jumlah indeks 118. Jumlah indeks ini naik tipis satu poin dibandingkan kuartal IV-2011 yang sebesar 117. Kepercayaan konsumen pada kuartal I ini mencapai indeks tertinggi sejak 2010.<sup>20</sup>

Jika kita berbicara daya beli pasar maka kita akan melihat seberapa kuat daya beli masyarakat Indonesia, ada hal yang menarik saat ini untuk Indonesia bahwa Data Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, jumlah kelas menengah di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir melonjak cukup tajam. Dalam laporan berjudul "The Rise of Asia's Middle Class 2010", disebutkan, jumlah kelas menengah di Indonesia pada 2009 mencapai sekitar 42,7 persen atau 93 juta jiwa dari total penduduk. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan 1999 dimana jumlah kelompok kelas menengah tercatat 45 juta jiwa atau 25 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan, pada 1990 jumlah kelas menengah baru 32 juta jiwa. Data yang dirilis Bank Dunia (BD) malah menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi. Tahun 2010

---

<sup>19</sup> Pelaku Industri Mamin Fokus Garap Pasar Domestik, dalam [WWW.NERACA.CO.ID](http://WWW.NERACA.CO.ID), diakses 2 mei 2012

<sup>20</sup> Daya Beli Masyarakat RI Masih Kelak dari China, dalam [Okazone.com](http://Okazone.com), diakses 2 mei 2012

kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata konsumen Indonesia adalah membeli produk teknologi baru (30 persen), liburan (28 persen), investasi saham (24 persen), dan membayar pinjaman/kartu kredit (21 persen).

Indonesia menjadi negara dengan persentase pertumbuhan kelas menengah yang tertinggi di kawasan ASEAN, yakni 38 persen. Indonesia berperan kentara dan sangat menentukan karena menyumbang kenaikan kelas menengah terbesar di Asia setelah Cina dan India. Bertambahnya kelas menengah merupakan sinyal baik bagi pertumbuhan ekonomi. Merekalah konsumen potensial yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi produktif.

Untuk itu, Mendag juga menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan potensi pasar dalam negeri, merangkak di mata nilai (climbing up the value chain) dengan terus mendorong pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta melakukan revitalisasi pasar. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga memiliki komitmen tinggi untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. Pemerintah harus memastikan barang yang di konsumsi masyarakat sesuai dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan mengikuti peraturan yang ada. Untuk itu pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar sehingga tidak merugikan konsumen.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai adalah merujuk pada sasaran strategis Kementerian Perdagangan 2012 untuk mewujudkan stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri yang ditandai dengan beberapa indikator berikut ini;

1. 95% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri.
2. Tercapainya stabilisasi harga bahan pangan utama, dengan indikator rata-rata koefisien variasi dari 10 komoditas pangan utama sebesar tidak lebih dari 7%.
3. Kontribusi sektor perdagangan meningkat dengan indikator Pertumbuhan PDB Riil tahunan pedagang besar dan eceran minimum 7%.

Pemerintah pusat tidak mungkin bias bekerja sendiri maka Dukungan dan kerjasama seluruh pemerintah daerah ini juga sangat diperlukan untuk mencapai sasaran strategis stabilisasi harga dan penguatan pasar dalam negeri. Adapun bentuk dukungan yang diperlukan dari seluruh pemerintah daerah itu adalah;

- Melakukan sinkronisasi program/kegiatan pusat dengan daerah. Hal ini sangat diperlukan untuk Menghindari duplikasi (tumpang tindih) pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD terhadap obyek pembangunan yang sama. Dan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Aktif dan tepat waktu menyampaikan data dan informasi harga stok bahan pokok.

- Meningkatkan kampanye perubahan pola konsumsi (pengurangan konsumsi beras dan gula) di daerah.
- Meningkatkan partisipasi UMKM pada ajang pameran dalam negeri.
- Daerah di harapkan melaksanakan revitalisasi pasar TP dan DAK sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.

Hal lain yang menjadi perhatian Perdagangan antar pulau di Indonesia saat ini diakui pemerintah masih jauh dari efisien. Banyaknya pungutan yang diberlakukan membuat pasar di dalam negeri belum berkembang. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui banyaknya pungutan yang dialami pengusaha harus dihapuskan sehingga pasar dalam negeri berkembang.<sup>21</sup>

Bahan baku produk manufaktur yang masih mempunyai prospek yang menjanjikan sebaiknya dibuat dan diolah di dalam negeri. Selain itu komponen impor seperti produk setengah jadi juga dapat dialihkan menggunakan produk lokal. Hilirisasi bahan primer seperti produksi pertambangan dan perkebunan untuk diolah di dalam negeri menjadi barang setengah jadi dapat meminimalisasi masuknya barang impor. barang setengah jadi itu bermanfaat untuk industri manufaktur yang masih memiliki prospek yang menjanjikan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Banyak Pungutan, Perdagangan Antar Pulau di RI Tak Efisien, dalam detik.com, diakses agustus 2012

<sup>22</sup>Prioritaskan Pasar Domestik Antisipasi Krisis Eropa, dalam [www.investor.co.id](http://www.investor.co.id), diakses 8 agustus

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya memperkuat market domestik Yakni dengan menggiatkan program pasar percontohan.salah satu sasaran ke sana (kenaikan nilai transaksi). Sebab setelah direvitalisasi harus ada perbedaan. Kalau kemudian ternyata berhasil tentu ditunjang fasilitas yang memadai, sehingga pedagang makin nyaman dan pembeli akan datang, akhirnya omzet akan naik. Kalau memungkinkan aktivitas kegiatan ditambah, dari 12 jam menjadi 24 jam. Selain itu, Kemendag akan melengkapi fasilitas Google Earth dalam memantau pasar percontohan. Apalagi di pasar percontohan tersebut ditambah kamera pengawasan (CCTV). Hal itu memudahkan untuk memantau kegiatan di pasar percontohan secara jarak jauh, seperti berlangsung selama 12 jam maupun 24 jam bisa diketahui lewat fasilitas tersebut.

Dalam dua bulan ini sudah meresmikan empat pasar dari total 20 pasar percontohan sepanjang 2012.Untuk mendukung pasar domestik, pihaknya berencana untuk menambah anggaran revitalisasi pasar pada tahun ini.Sedangkan sebelum ini anggaran yang sudah disiapkan sebanyak Rp 400 miliar untuk 79 pasar. Anggaran itu jauh lebih rendah dari 2011 lalu sebanyak Rp 650 miliar untuk merevitalisasi 228 pasar, termasuk di dalamnya tambahan dari APBN-P.khusus untuk 20 pasar percontohan di 20 kabupaten/kota disiapkan anggaran sejumlah Rp 180,5 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya untuk segi fisik, tapi meliputi sistem manajemen dan

pemberdayaan pedagang. Untuk itu pihaknya membentuk tim khusus sebagai pendampingan.<sup>23</sup>

Pencanangan kembali cinta produk dalam negeri yang menjadi salah satu penopang pasar domestik juga berkumandang seolah baru disadari manfaatnya setelah produk dalam negeri benar-benar terpinggirkan. Bahkan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk memandu penggunaan produk dalam negeri dengan akan diterbitkannya Inpres Penggunaan Produk Dalam Negeri yang merevisi Keppres No. 80 Tahun 2003. Melalui regulasi tersebut akan ada mekanisme pembatasan-pembatasan impor barang konsumtif demi untuk menopang penguatan pasar domestik melalui tata niaga impor. Bahkan demi keselamatan pasar domestik, pemerintah harus tega menjatuhkan sanksi tegas bagi peredaran produk impor yang sudah membahayakan industri nasional melalui perlindungan pasar (safeguard) dan antidumping.<sup>24</sup>

Pengendalian ekspor itu dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan (over-exploitation) atas sumber daya alam mineral Indonesia. Selain itu, pengetatan ekspor bertujuan agar perusahaan-perusahaan tambang mineral bersedia membangun industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.<sup>25</sup> Indonesia juga harus meningkatkan iklim usaha perdagangan, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel

<sup>23</sup> Genjot pasar domestik, Mendag minta tambahan

<sup>24</sup> PASAR DOMESTIK INDONESIA: Menjadi Target Potensial Banyak Negara, dalam ditjenpdn.depgad.co.id, diakses 8 agustus 2012.

<sup>25</sup> Pemerintah Larang Ekspor Bahan Mentah Mineral, dalam republika.co.id, diakses 8 agustus 2012

tradisional dan modern, bisnis waralaba. Semua target-target tersebut diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan bagi penguatan pasar dalam Domestik Indonesia. Ini hal-hal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi pasar domestik